

NAHDLATUL ULAMA DALAM PUSARAN POLITIK: SEBUAH OTOKRIKTIK ORIENTASI NU DALAM POLITIK PERSPEKTIF INSIDER

Mahathir Muhammad Iqbal

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Raden Rahmat Malang
email: Iqbalz_mm@yahoo.com

ABSTRACT

A healthy and strong democratic state does not only require a strong political world. Of course, it is important to have a strong party, a strong leader, and a strong government. However, democracy also requires civil society which is also healthy and strong. In the political science literature, the political world and civil society are distinguished by political positions. The world of politics is the political territory of citizens who are prepared to fight for positions of government. The main vehicle is a political party. Meanwhile, civil society is the area of activity for citizens outside the government. The main vehicle is mass organizations. Deliberately, the world of civil society did not want to take part in the power struggle for the position of government. They deliberately chose a position outside the government to control the government. NU is expected to be in this position. Who always kept his distance from the world of practical politics and power. That way, the independence of NU as an authoritative mass organization is maintained.

Keyword: *democracy; civil society; independence; nahdlatul ulama.*

ABSTRAK

Negara demokrasi yang sehat dan kuat tak hanya membutuhkan dunia politik (political society) yang kuat. Tentu saja, penting memiliki partai yang kuat, pemimpin yang kuat, dan pemerintahan yang kuat. Namun, demokrasi juga membutuhkan masyarakat madani (civil society) yang juga sehat dan kuat. Dalam literatur ilmu politik, dunia politik dan masyarakat madani dibedakan oleh posisi politik. Dunia politik adalah wilayah berpolitik warga negara yang memang dipersiapkan untuk bertarung merebutkan posisi pemerintahan. Kendaraan utamanya adalah partai politik. Sementara itu, masyarakat madani adalah wilayah aktivitas warga negara di luar pemerintahan. Kendaraan utamanya adalah ormas. Secara sengaja, dunia civil society itu memang tak ingin ikut dalam pertarungan kekuasaan merebutkan posisi pemerintahan. Mereka sengaja memilih posisi di luar pemerintahan untuk mengontrol pemerintahan. NU diharapkan berada pada posisi ini. Yang senantiasa mengambil jarak dengan dunia politik praktis dan kekuasaan. Dengan begitu, independensi NU sebagai sebuah ormas yang berwibawa tetap terjaga.

Kata Kunci: *demokrasi; civil society; independensi; nahdlatul ulama.*

PENDAHULUAN

Setiap ada hajatan kontestasi politik yang dikenal dengan istilah pemilu, pasti tidak hanya menyedot atensi publik dan media massa, turbulensi politik pemilu di semua level yang begitu kuat juga seringkali menyeret dua organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Hal ini bukan sesuatu yang tanpa alasan. Pertama, Pemilu sebagai kekuatan politik melayani beberapa kepentingan sekaligus. Pertama, sebagai medium bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi politik. Kedua, sebagai medium bagi masyarakat untuk mengevaluasi partai, wakil rakyat serta pemimpin yang berkuasa. Ketiga, sebagai sarana bagi kekuatan politik untuk meraih kekuasaan.¹

Kedua, memang suara ormas seperti NU dan Muhammadiyah mudah menjadi pusat perhatian banyak pihak. Meminjam istilah KH. Mustafa Bisri, seringkali NU dan Muhammadiyah terlampaui *ge-er* (gedhe rumangsa). Jika NU dan Muhammadiyah terus terlibat aksi dukung-mendukung dan bahkan lebih mempertegas sikap partainya, tradisi politik yang kurang baik akan terulang. Yakni hanya menjadikan NU dan Muhammadiyah sebagai batu loncatan semata untuk mencapai tangga kekuasaan.²

NU sebagaimana saat awal didirikannya adalah *jam'iyah diniyah*. Hanya karena tarikan politik yang sedemikian kuat, NU akhirnya tergoda untuk memasuki kawasan politik. (Nur Syam, JP, 12 Maret 2010, hal 4). Izzato Millati dalam tulisannya yang berjudul "Kilas NU dan Politik", memberikan ulasan ringkas bagaimana NU dalam sejarahnya tidak lepas dari ketersinggungan politik. Berawal dari MIAI (Majelis Islam A'la Indonesia), NU akhirnya terlibat dalam masalah-masalah politik. Namun, eksistensi MIAI tidak berlangsung lama, pada Oktober 1943, MIAI akhirnya membubarkan diri dan digantikan oleh Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia). Pada awalnya, Masyumi merupakan sebuah organisasi non politik, tetapi, setelah Indonesia merdeka, Masyumi akhirnya ditahbiskan menjadi partai politik, dan memutuskan NU sebagai tulang punggung Masyumi. Pada tahun 1940-1950, Masyumi akhirnya menjadi partai politik terbesar di Indonesia. Masyumi merupakan partai yang heterogen anggotanya, sehingga perbedaan kepentingan politik banyak terjadi didalamnya. Dan hal tersebutlah yang telah menyebabkan NU keluar dari Masyumi dan menjadi partai politik yang bernama sama, yaitu NU. Setelah menjadi partai politik, NU mengukir sejarah yang monumental, NU berhasil mendapatkan suara yang cukup besar dan berhasil memperoleh 45 kursi di parlemen pada pemilu 1955. Perolehan suara NU tidak hanya terjadi pada pemilu 1955, pada pemilu selanjutnya, yaitu pemilu 1971 NU juga berhasil memperoleh suara yang cukup besar. Keberhasilan NU ini dinilai karena kemampuan NU menggalang solidaritas dilingkungan kaum santri, serta adanya dukungan penuh dari basis tradisionalnya.³

Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa NU adalah termasuk salah satu organisasi yang sepanjang perjalanan sejarahnya senantiasa mengalami perubahan orientasi dan bentuk; ia lahir sebagai organisasi sosial-keagamaan, namun tumbuh, berkembang dan menjadi besar setelah terlibat aktif dalam gelanggang politik praktis. Perubahan-perubahan yang dilakukan itu, disatu sisi menunjukkan bahwa NU ternyata mampu beradaptasi dengan perubahan situasional, namun disisi yang lain, perubahan seperti itu justru semakin memperkuat asumsi bahwa NU dipandang tidak mempunyai pendirian, tidak konsisten, dan berwatak dualistik. (Badrun Alaena, 2000: 65). Berangkat dari latar belakang diatas, penulis tertarik meneliti tentang reorientasi politik NU pada skala nasional dan lokal (Kabupaten Malang).

¹ Muhammad Qodari, JP 28 Mei 2008, hal 4.

² Ahmad Fuad Fanani, Syahwat Politik Muhammadiyah, JP edisi 23 Mei 2004, hal 4.

³ (<https://www.nu.or.id/post/read/52693/kilas-nu-dan-politik>).

PEMBAHASAN

1. NU vis a vis Politik

NU memang pernah secara formal mengambil jarak dengan dunia politik praktis melalui kesepakatan dalam muktamar ke-27 di Situbondo 1984. Konsepnya, kembali ke garis pesan substantif pada awal pendiriannya alias kembali ke Khittah 1926. Yakni, menjaga jarak dengan dunia politik seraya menjadikannya sebagai gerakan sosial untuk perubahan. Baik dalam NU maupun di tingkat negara (di mana NU selalu bersikap kritis terhadap kekuasaan yang otoriter). Nama NU pada era itu memang sangat menonjol dan disegani. Para elite NU giat melakukan pemberdayaan umat, termasuk menggalang kekuatan lintas komunitas dalam semangat kebangsaan.⁴

Meskipun demikian, pergulatan politik masih saja diminati oleh NU. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal ini bisa terjadi.⁵ Pertama, partai politik masih dilihat relevan di dalam memperjuangkan kepentingan-kepentingan NU, atau setidaknya elite NU. Relevansi ini tidak lepas dari keuntungan-keuntungan yang didapatkan NU selama bergulat dengan politik. Bibit Suprpto mengidentifikasi keuntungan itu, selama 1952-1973, kedalam tiga bidang: keagamaan, politik, dan sosial budaya.⁶

Kedua, para politisi masih berpengaruh kuat di tubuh NU. Dan ketiga, situasi sistem politik masih memungkinkan adanya perjuangan kepentingan lewat jalur politik. Dan NU ingin memanfaatkan situasi seperti itu.

Hal inilah yang menjelaskan kenapa pada era reformasi NU kembali masuk dalam kancah politik yang didahului dengan pendirian PKB dengan Gus Dur sebagai tokoh utamanya. Gerbong NU yang sebelumnya berisi para aktivis pelaku gerakan sosial mulai berhamburan masuk ke arena politik, baik melalui PKB maupun parpol lain, menikmati kekuasaan dan materi yang menyertainya. Karena itu, sejarah pun kembali mencatat, orientasi dan fokus para elitnya adalah perebutan kekuasaan, bukan lagi pada pemberdayaan umat. Warga arus bawah pun, boleh jadi, tidak hanya mulai kehilangan para patron yang bisa menjadi acuan, melainkan juga bisa kehilangan simpati terhadap NU.⁷

2. NU Dalam Dinamika Politik Nasional dan Lokal (Kabupaten Malang)

Sebelum kita berbicara lebih jauh soal orientasi politik NU, perlu dipertegas disini bahwa pasca muktamar tahun 1983 di Situbondo, NU memantapkan eksistensi diri sebagai sebuah organisasi masyarakat yang bergerak dalam wilayah kultural. Bukan wilayah politik praktis. Yang NU perjuangkan adalah politik kebangsaan atau politik kerakyatan. Sehingga implikasinya kepada NU menjadi jelas. Implikasi itu adalah, meminjam konsep yang diperkenalkan oleh Kiai Sahal Mahfudh, politik kekuasaan yang lazim disebut politik tingkat rendah (*siyasa safilah*) adalah porsi partai politik bagi warga negara, termasuk warga NU secara perseorangan. Sedangkan NU sebagai lembaga atau organisasi, harus steril dari politik semacam itu. Kepedulian NU terhadap politik diwujudkan dalam peran politik tingkat tinggi, yakni politik kebangsaan, politik kerakyatan, dan etika berpolitik.⁸

Ketika NU dibawah kepemimpinan KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), ormas itu memulai strategi berpolitik yang sama sekali baru dan segar, yakni “kultural-

⁴ Laode Ida, JP, 24 Maret 2010, hal 4

⁵ Marijan, Kacung. 1992. *Quo Vadis NU; Setelah Kembali Ke Khittah 1926*. Jakarta: Erlangga. Hal 135-136.

⁶ Silakan baca lebih lanjut buku yang ditulis oleh Bibit Suprpto yang berjudul *Nahdlatul Ulama: Eksistensi Peran dan Prospeknya*, halaman 64-73.

⁷ Laode Ida, JP, 24 Maret 2010, hal 4

⁸ (<https://www.nu.or.id/post/read/104034/politik-nu-politik-kebangsaan-dan-politik-kerakyatan>).

kerakyatan”, bukan lagi “struktural-kekuasaan”. Strategi politik “kultural-kerakyatan” tersebut diprakarsai oleh sejumlah kiai/tokoh muda NU kala itu, seperti KH. Ahmad Shiddiq, KH Shahal Mahfudz, KH. Muchit Muzadi, KH. Mustafa Bisri, dan KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sendiri. Sebagai ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Gusdur berbeda dengan para pendahulunya yang cenderung kompromistis dengan kekuasaan. Saat itu, dia tampil sebagai aktivis-intelektual yang kritis terhadap segala bentuk politisasi dan arigansi yang dilakukan negara.⁹

Bahkan, Sumanto Al Qurtuby memberikan identifikasi bahwa sejak 1984, Gus Dur menjadi ikon gerakan politik “kultural-kerakyatan” di tubuh NU. Dibawah komando Gus Dur pula, NU kemudian menjelma menjadi kekuatan *civil society* ala Tocquivillean yang sangat kritis terhadap pemerintah/kekuasaan.¹⁰

Tetapi, jika kita lihat secara jujur dengan hati yang lapang, terbuka, serta pikiran yang jernih, NU kini menjadi sebuah organisasi yang tidak jelas identitasnya. Hal ini disebabkan karena sejumlah tokoh NU yang bernafsu kepada kekuasaan. Akibatnya NU menjadi kehilangan “wibawa kultural” sebagai ormas keagamaan dan agen *civil society* yang seharusnya menjaga jarak terhadap kekuasaan politik agar bisa selalu bersikap kritis terhadap pemerintah. Lebih dari itu, lantaran sejumlah kiai dan tokoh NU yang memiliki syahwat politik kekuasaan pula, meminjam istilah Max Weber, “karisma tradisional” kiai menjadi rontok di mata umat.¹¹

Dalam skala nasional misalnya, kita bisa ambil contoh dalam level pemilu serentak 2019. Dinamika politik pra pendaftaran calon presiden dan wakil presiden ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), memberikan kepada kita sebuah informasi bahwa kegagalan Mahfud MD dalam mendampingi Jokowi disebabkan karena adanya campur tangan elit Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Bahkan elit NU itu “mengancam” bahwa jika yang terpilih menjadi Wakil Presiden mendampingi Jokowi bukan dari kalangan NU, NU tidak akan bertanggung jawab secara moral terhadap pemerintahan yang sah.¹²

Dalam konteks tersebut, telah terjadi sebuah inkonsistensi sikap. KH Said Aqil Siradj, dalam tulisannya yang berjudul “Kembalilah Ke Habitat Kultural” di Jawa Pos, menegaskan bahwa Islam kultural memiliki peranan sangat penting bagi kontinuitas misi Islam di muka bumi. Suatu peran yang tak diwarisi Islam politik yang hanya mengejar kekuasaan instan. Karena itu, Islam kultural harus tetap eksis. Lenyapnya pola Islam kultural berarti lenyapnya Islam di dunia yang berakibat pada kehancuran Islam. Lebih jauh lagi KH. Said Aqil Siradj, menjelaskan bahwa NU harus kembali meneguhkan visinya yang lebih memancarkan independensi dan egalitarian. Politik adalah *grey area*, tempat lalu lalang kepentingan yang bila tak waspada bisa menyeretnya pada kenikmatan sesaat. Karena itu, secara politik warga NU akan lebih baik dibebaskan untuk memilih partai.¹³

Oleh karenanya, dalam skala yang sama, NU melalui elit-elit nya juga dianggap sudah terlalu jauh dalam melangkah. Ormas terbesar di Tanah Air itu sudah berani blak-blakan mengusulkan tambahan jatah menteri untuk kader NU di kabinet berikutnya. "Tidak ada dukungan politik yang gratis!" tegas Wakil Rais Syuriah PWNU

⁹ (Sumanto Al Qurtuby, JP, 15 Maret 2010, hal 4)

¹⁰ Ibid

¹¹ Ibid

¹² Untuk lebih lengkapnya, silakan simak pernyataan Prof. Mahfud MD yang disampaikan pada program Indonesian Lawyers Club pada 14 Agustus 2018 yang mengangkat tema "Kejutan Cawapres: Antara Mahar Politik dan PHP". Pernyataan Prof Mahfud MD ini juga dapat disimak dalam channel You Tube "<https://www.youtube.com/watch?v=W4Dbd3b9GSo&t=1075s>".

¹³ Said Aqil Siradj, “Kembalilah Ke Habitat Kultural”, Jawa Pos.

Jawa Timur, KH Agoes Ali Masyhuri (Gus Ali) usai menghadiri Halal bi Halal Keluarga Besar Gabungan Asosiasi Petani Perkebunan Indonesia (Gapperindo) di Masjid Al Akbar Surabaya, Rabu (19/6) malam. Bahkan, pengasuh Ponpes Bumi Shoawat, Tulangan, Sidoarjo ini yakin jika kader NU yang diusulkan akan pos menteri yang strategis. "Insya Allah akan mendapat posisi yang strategis," katanya.¹⁴ Hal ini dipertegas oleh pidato yang disampaikan oleh Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj dalam peringatan Hari Lahir ke-73 Muslimat NU di Jakarta, Ahad (27/1/2019), mengindikasikan bahwa dia sedang bermain politik dengan meminta jatah jabatan kepada penguasa.¹⁵

Direktur Wahid Institute, Yenny Wahid mengkritik sikap Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj, yang mulai menyiapkan kader-kader Nahdlatul Ulama, untuk mengisi jabatan menteri pada kabinet Presiden Joko Widodo periode 2019-2024. Yenny mengatakan, NU sebagai Ormas Islam tidak boleh terkesan meminta-minta jabatan dalam pemerintahan, termasuk jabatan menteri. Alasannya, kesan meminta-minta jabatan itu dapat berdampak buruk dalam penilaian publik. Menurut putri kandung almarhum KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur itu, NU dapat membantu Pemerintah dengan memberikan saran konstruktif maupun kritik membangun, terhadap setiap kebijakan yang ditetapkan Pemerintah, tanpa perlu kader NU itu turut menduduki kursi-kursi jabatan menteri.¹⁶

Bagaimana dengan dinamika politik di Kabupaten Malang, terutama menjelang pilkada tahun 2020? ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PW NU) Jawa Timur, KH. Marzuki Mustamar, pada 5 Agustus 2019 menginisiasi sebuah pertemuan di Pondok Pesantren (Ponpes) Sabilurrosyad di Gasek, Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Pertemuan itu sendiri digelar dengan tujuan untuk menyatukan suara NU dalam mendukung satu paslon calon Bupati dari NU.¹⁷

Pertemuan itu mengeluarkan keputusan untuk membentuk tim Lajnah Siyasa atau panitia seleksi (pansel). Tim yang beranggotakan: Rektor Unisma Prof Dr H. Maskuri Bakri MSi, Syaiful Arif, Ustad Sibaweh, Ustad Arifin, dan Ketua Yayasan PP Darun Najah Karangploso H. Abu Yazid Al-Bustomi Muchtar ini bertugas menjaring kader NU sekaligus mengerucutkan menjadi satu calon. Lajnah Siyasa ini bersifat *ad hoc*. Tim tersebut yang akan menyeleksi siapa kader NU yang paling layak diusung dalam Pilbup Malang 2020. Setelah memutuskan calon yang diusung, Lajnah Siyasa juga yang akan berkeliling ke calon pemilih untuk mengenalkan calon dari NU. Tugasnya, tim tersebut mengedukasi dan memberikan pencerahan di daerah-daerah.¹⁸

¹⁴ <https://www.merdeka.com/politik/nu-blak-blakan-minta-jatah-menteri-dukungan-nahdliyin-ke-jokowi-tidak-gratis.html>

¹⁵ Kutipan lengkap pidatonya seperti ini: "Imam masjid, khatib-khatib, KUA-KUA, Menteri Agama, harus dari NU. Kalau dipegang selain NU, [nantinya dianggap] salah semua; nanti banyak [tuduhan] bidah kalau selain NU. Ini bidah nanti. Tari-tari sufi [dituduh] bidah nanti". Bisa dilihat dalam link "<https://tirto.id/pidato-said-aqil-tuduhan-dan-bantahan-nu-minta-jabatan-dfkM>".

¹⁶ Pernyataan lengkapnya: "Saya mengimbau kepada petinggi-petinggi NU untuk tidak terjebak pada retorika, seolah-olah dipahami kita menuntut kursi kabinet dan lain sebagainya. Karena peran yang harus dijalankan oleh NU adalah peran yang sinergis dengan Pemerintah, melakukan pemberian masukan-masukan yang konstruktif, ketika ada kritik pun kritik yang membangun. Artinya, pemerintahannya (dijabat) siapa pun, NU harus mampu bekerja sama dan mampu menjaga jarak yang sehat," (https://kbr.id/nasional/07-2019/yenny_wahid_kritik_sikap_pbnu_yang_terkesan_minta_jabatan_menteri/99847.html).

¹⁷ "Koalisi Gasek Usung Satu Kader NU" Jawa Pos Radar Malang, 5 Agustus 2019. Hal 1

¹⁸ "perdana, NU Bentuk Pansel Cabup" Jawa Pos Radar Malang, 6 Agustus 2019. Hal 1.

Dengan dibentuknya tim Lajnah Siyasah, implikasinya menjadi sangat jelas, NU hanya akan merekomendasikan satu nama calon bupati.¹⁹ Demi kepentingan seleksi, tim pun sudah menetapkan rambu-rambu. Pertama, kandidat yang didukung berstatus sebagai calon bupati (cabup). Bukan calon wakil bupati (cawabup). Kedua, kader NU atau non-NU tapi mempunyai kepedulian terhadap kaum *nahdliyin*. Ketiga, sudah mendapatkan rekomendasi pencalonan dari partai politik (parpol). Jika semua nama-nama yang masuk penjangkaran sudah mendapatkan rekom parpol, maka diprioritaskan rekom dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Keempat, bersedia menandatangani pakta integritas yang disusun oleh tim Lajnah Siyasah.²⁰

Yang menarik adalah, belum juga Lajnah Siyasah bekerja dan mengeluarkan rekomendasi terhadap calon dari kalangan NU yang harus didukung, ada tiga tokoh NU yang mencoba peruntungan dengan mendaftarkan diri kepada PDIP. Ketiganya adalah Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PC NU) Kabupaten Malang dr Umar Usman, Rektor Universitas Raden Rahmat (Unira) Hasan Abadi, dan Wakil Ketua Umum Lembaga Seniman Budayawan Muslimin Indonesia (Lesbumi) PB NU Juma'ali.²¹

Diakui atau tidak, pembentukan Lajnah Siyasah sebetulnya telah melibatkan NU secara organisatoris kedalam politik praktis. Karena Lajnah Siyasah telah mengambil alih fungsi pokok dari partai politik. Kedua, kans untuk menyatukan suara NU adalah sesuatu yang mustahil. Karena kita harus jujur mengakui bahwa preferensi politik warga NU itu sangat cair. Mereka bisa aktif dipartai apa saja dan mendukung calon siapa saja. Mengidentifikasi preferensi politik warga NU ke dalam partai atau calon tertentu itu sama saja melakukan simplifikasi bahkan mengerdilkan warga NU.

KESIMPULAN

Dengan melihat kondisi faktual dinamika politik di Kabupaten Malang, dimana NU sangat rentan sekali terseret dalam politik praktis karena akselerasi yang dilakukan para elitnya, maka hendaknya visi politik NU harus dikembalikan ke politik simbolis, bukan politik praktis. Arif Afandi mengidentifikasi beberapa manfaat terkait dengan langkah politik simbolis ini. Pertama, memberikan kesempatan kepada para kader NU yang kebetulan terlibat dalam kegiatan politik praktis untuk "memanfaatkan" secara cerdas simbol-simbol NU untuk kepentingan politik praktis. Kedua, menghindarkan NU dari ajang pertempuran politik yang manfaat dan mudaratnya tentu tidak sepadan, yakni lebih banyak mudaratnya. Ketiga, politik simbolis adalah politik "kelas tinggi". Sebab, biasanya, orang yang menggunakan politik simbolis adalah orang yang matang dalam dunia politik. Politik simbolis lebih save, tidak menimbulkan dampak politik yang serius. Kesadaran untuk lebih menggunakan simbol dalam politik praktis bagi para kader NU, tampaknya, sudah harus menjadi kesadaran, bahkan sebagai "kode etik".²²

Elite NU harus memosisikan diri sebagai guru bangsa dan teladan masyarakat. Untuk itu, mereka perlu mengembangkan nilai-nilai luhur tersebut dengan memulai dari mereka sendiri. Awal mula yang harus mereka lakukan adalah mengambil jarak dari dunia dan politik kekuasaan. Karena sejarah memberikan kita sebuah pelajaran bahwa

¹⁹ Tim Litbang *Jawa Pos Radar Malang* menemukan empat figur berlatar belakang *nahdliyin* yang siap meramaikan pesta demokrasi di Kabupaten Malang itu. Yakni H.M. Sanusi (Plt Bupati Malang yang juga *nahdliyin*), Ali Ahmad (ketua DPC PKB Kabupaten Malang), Saifullah Maksum (ketua DPP PKB), dan dr Umar Usman (ketua PC NU Kabupaten Malang). Plus Rektor Universitas Islam Raden Rahmat Malang (Unira Malang), Hasan Abadi, yang selama ini namanya tidak muncul dalam survei Jawa Pos Radar Malang "<https://radarmalang.id/nu-hanya-rekom-satu-nama/>".

²⁰ "NU Hanya Rekom Satu Nama" Jawa Pos Radar Malang, 4 September 2019. Hal 1.

²¹ "Ketika Tiga Tokoh NU "Tergoda" Partai Banteng" Jawa Pos Radar Malang, 12 September 2019. Hal 1.

²² Arif Afandi, *Kembalikan NU ke Politik Simbolis*, Jawa Pos edisi 25 Juli 2009. Hal 6.

kemandulan NU dalam mewujudkan visi dan mengemban misi NU berpulang pada terjabaknya NU dalam politik kekuasaan.²³

DAFTAR RUJUKAN

- Alaena, Badrun. 2000. *NU, kritisisme dan Pergeseran Makna Aswaja*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Marijan, Kacung. 1992. *Quo Vadis NU; Setelah Kembali Ke hittah 1926*. Jakarta: Erlangga.
- Suprpto, Bibit. 1987. *Nahdlatul Ulama; Eksistensi Peran dan Prospeknya*. Kabupaten Malang: Lembaga Pendidikan Maarif.

Media Massa

- "Ketika Tiga Tokoh NU "Tergoda" Partai Banteng" Jawa Pos Radar Malang. 12 September 2019. Hal 1.
- "Koalisi Gasek Usung Satu Kader NU" Jawa Pos Radar Malang, 5 Agustus 2019. Hal 1
- "NU Hanya Rekom Satu Nama" Jawa Pos Radar Malang, 4 September 2019. Hal 1.
- "perdana, NU Bentuk Pansel Cabup" Jawa Pos Radar Malang, 6 Agustus 2019. Hal 1
- A'la, Abd, *Kembalikan Roh Utama NU*, Jawa Pos edisi 11 Juli 2011.
- Afandi, Arif, "Kembalikan NU ke Politik Simbolis", Jawa Pos edisi 25 Juli 2009. Hal 6
- Al Qurtuby, Sumanto. "Nu dan "Politik Kerakyatan"" Jawa Pos, 15 Maret 2010. Hal 4
- Fanani, Ahmad Fuad, "Syahwat Politik Muhammadiyah", Jawa Pos, 23 Mei 2004. Hal 4.
- Ida, Laode, "NU dan Gerakan Islam Kontemporer" Jawa Pos Radar Malang, 24 Maret 2010. Hal 4.
- Qodari, Muhammad, "NU dan Muhammadiyah Dalam Pusaran Pemilu" Jawa Pos, 28 Mei 2004. Hal 4.
- Siradj, Said Aqil, "Kembalilah Ke Habitat Kultural", Jawa Pos.
- Syam, Nur, "Relasi Simbiosis NU-Politik" Jawa Pos, 12 Maret 2010. Hal 4.

Media Online

- https://kbr.id/nasional/07-2019/yenny_wahid_kritik_sikap_pbnu_yang_terkesan_minta_jabatan_menteri/99847.html
- <https://radarmalang.id/nu-hanya-rekom-satu-nama/>
- <https://tirto.id/pidato-said-aqil-tuduhan-dan-bantahan-nu-minta-jabatan-dfkM>
- <https://www.merdeka.com/politik/nu-blak-blakan-minta-jatah-menteri-dukungan-nahdliyin-ke-jokowi-tidak-gratis.html>
- <https://www.nu.or.id/post/read/104034/politik-nu-politik-kebangsaan-dan-politik-kerakyatan>
- <https://www.nu.or.id/post/read/52693/kilas-nu-dan-politik>
- <https://www.youtube.com/watch?v=W4Dbd3b9GSo&t=1075s>

²³ Abd, A'la, *Kembalikan Roh Utama NU*, Jawa Pos edisi 11 Juli 2011. Hal 4.